

**SAMARINDA GOVERNMENT: POLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DI RUANG VIRTUAL**

**Reksa Burhan<sup>1</sup>, Harry Isra Muhammad<sup>2</sup>, Muhammad Arfan Hardiansyah<sup>3</sup>, Ade Irma Surani  
Haliq<sup>4</sup>, Huznul Fadila<sup>5</sup>**

<sup>1,5</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup>Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Mulawarman

<sup>4</sup>Prodi Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palopo

Email Korespondensi: reksaburhan@fisip.unmul.ac.id

**ABSTRACT**

The digital revolution has fundamentally transformed the relationship between the state and its citizens by shifting various government activities and forms of public participation from the physical to the virtual realm. This transformation has spurred the emergence of digital governance and digital citizenship practices, which are increasingly shaping the patterns of interaction between the government and the public. This study aims to analyse the role of digital citizenship in enhancing the participation of urban communities and to map patterns of governance in the virtual space in the city of Samarinda, as a satellite city supporting the Capital City of Nusantara (IKN). The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through virtual observation, in-depth interviews and a documentary study involving local government officials, RT/RW leaders, and residents who use digital government services. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman and Saldaña interactive model, within the theoretical framework of the digital revolution proposed by Ross Tapsell. Research findings indicate that digitalisation has driven a shift in patterns of citizen participation from formal, procedural mechanisms towards virtual participation that is more spontaneous, flexible and based on everyday digital interactions. Social media, online discussion groups and public service applications such as SAMAGOV have become the primary means for citizens to voice their concerns, exercise oversight and establish communication with local government. On the other hand, the Samarinda City Council has adopted various digital platforms to improve service accessibility and bureaucratic responsiveness. However, the effectiveness of digital governance still faces challenges in the form of a digital literacy gap amongst civil servants, sub-optimal two-way communication, and the potential for information polarisation in cyberspace. This study concludes that virtual governance in Samarinda represents a strategic adaptation to the demands of the digital society and serves as a vital foundation for strengthening a more responsive, participatory and transparent government in the post-digital era.

**Keywords:** Samarinda government, Digital governance, Participation, Digital revolution.

**ABSTRAK**

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental hubungan antara negara dan warga negara dengan menggeser berbagai aktivitas pemerintahan dan partisipasi publik dari ruang fisik menuju ruang virtual. Transformasi ini mendorong munculnya praktik *digital governance* dan *digital citizenship* yang semakin memengaruhi pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewargaan digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perkotaan serta memetakan pola penyelenggaraan pemerintahan di ruang virtual di Kota Samarinda sebagai kota satelit penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi virtual, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap aparat pemerintah daerah, pengurus RT/RW, serta warga pengguna layanan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

349

Indexed



digital pemerintahan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka teori revolusi digital yang dikemukakan oleh Ross Tapsell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong pergeseran pola partisipasi warga dari mekanisme formal-prosedural menuju partisipasi virtual yang lebih spontan, fleksibel, dan berbasis interaksi digital sehari-hari. Media sosial, grup percakapan daring, dan aplikasi layanan publik seperti SAMAGOV menjadi sarana utama bagi warga dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah Kota Samarinda telah mengadopsi berbagai platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dan responsivitas birokrasi. Namun demikian, efektivitas tata kelola digital masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital aparatur, belum optimalnya komunikasi dua arah, serta potensi polarisasi informasi di ruang siber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola virtual di Samarinda merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap tuntutan masyarakat digital dan menjadi fondasi penting bagi penguatan pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan transparan di era pasca-digital.

**Kata kunci:** Pemerintahan Samarinda, Pemerintahan Digital, Partisipasi, Revolusi Digital.

## PENDAHULUAN

Revolusi digital telah menjadi fenomena global yang meredefinisi struktur sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, gelombang digitalisasi ini mulai menunjukkan pengaruh masifnya sejak tahun 2008, yang ditandai dengan perubahan pola konsumsi informasi dan interaksi sosial yang sangat dinamis (Tapsell, 2015). Dampak paling signifikan dari transformasi ini adalah rekonstruksi hubungan antara negara dan warga negara yang sebelumnya bersifat kaku, hierarkis, dan birokratis menjadi lebih cair serta transparan (A F Saputra, 2021).

Digitalisasi mendorong institusi pemerintahan untuk mengadopsi instrumen teknologi guna mempercepat distribusi informasi dan layanan publik. Sebaliknya, warga negara kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses otoritas negara tanpa harus melewati sekat-sekat birokrasi fisik yang seringkali dianggap lamban dan tidak efisien (Kencana & Meisyanti, 2020). Ruang virtual pun muncul sebagai arena alternatif bagi warga untuk mengekspresikan gagasan, kritik, dan partisipasi politiknya secara *real-time* yang melampaui batas-batas administratif tradisional (Udhany & Irwansyah, 2021).

Dalam konteks masyarakat perkotaan, partisipasi tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik di ruang-ruang formal seperti Musrenbang atau rapat di balai kelurahan. Ledakan digital telah menggeser keterlibatan warga menuju platform virtual yang lebih fleksibel dan inklusif (Nuswantoro et al., 2017). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai kewargaan digital (*digital citizenship*), di mana individu menggunakan teknologi untuk terlibat secara aktif dalam urusan publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah (Tapsell & Jurriëns, 2017).

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki karakteristik unik dalam merespons fenomena ini. Dengan populasi mencapai 881.225 jiwa dan statusnya sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda mengalami tekanan digitalisasi yang lebih kuat (BPS Kota Samarinda 2024). Dominasi kelas menengah dan pelaku usaha dengan literasi teknologi tinggi menjadikan kota ini sebagai laboratorium ideal untuk mengamati transisi tata kelola pemerintahan ke arah digital governance.

Dalam konteks transformasi digital pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Samarinda menjadi salah satu pemerintah lokal yang secara aktif mengembangkan model digital governance melalui integrasi pelayanan publik berbasis aplikasi digital. Salah satu bentuk konkret dari transformasi tersebut adalah peluncuran aplikasi resmi pemerintah daerah bernama SAMAGOV (Samarinda Government), sebuah super-app yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik digital dalam satu platform terpadu. Kehadiran SAMAGOV menunjukkan adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan daerah dari pola birokrasi administratif konvensional menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi,

responsif, dan berbasis teknologi informasi.

Secara konseptual, pengembangan super-app pemerintahan seperti SAMAGOV merepresentasikan evolusi digital governance pada level lokal. (Janowski, 2015) menjelaskan bahwa digital governance tidak lagi terbatas pada digitalisasi administrasi, tetapi berkembang menjadi transformasi menyeluruh terhadap pola komunikasi, pelayanan, dan interaksi negara dengan warga negara. Dalam konteks ini, SAMAGOV bukan sekadar aplikasi pelayanan publik, tetapi menjadi medium baru yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam ruang virtual yang lebih terbuka dan partisipatif.

**Gambar 1: Tampilan Aplikasi layanan Samagov**



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Aplikasi SAMAGOV dikembangkan sebagai bagian dari program Samarinda Smart City yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi digital. Pemerintah Kota Samarinda menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk “memusatkan aplikasi pendukung kota Samarinda dalam satu platform sehingga menjadi super-app yang dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan warga dan masyarakat kota Samarinda.” Kehadiran aplikasi ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah mulai mengadopsi model interoperabilitas layanan digital yang selama ini banyak diterapkan pada konsep smart city di berbagai kota global.

Sebagai sebuah super-app pemerintahan, SAMAGOV menyediakan berbagai fitur pelayanan publik digital yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi RT, kelurahan, dan kecamatan secara daring; melakukan pengecekan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); memantau CCTV kota secara real-time untuk melihat kondisi lalu lintas, banjir, dan cuaca; mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial; hingga menggunakan layanan darurat Samarinda Siaga 112. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur pelacakan dokumen publik yang memungkinkan masyarakat memonitor proses pengajuan administrasi secara berkala melalui sistem notifikasi otomatis.

Transformasi tersebut memperlihatkan adanya perubahan pola hubungan negara dan warga negara dalam konteks pemerintahan lokal. Pemerintah tidak lagi bekerja secara tertutup dan hierarkis, tetapi mulai bergerak menuju model pemerintahan digital yang lebih horizontal dan komunikatif. (Tapsell & Jurriëns, 2017) menjelaskan bahwa revolusi digital di Indonesia telah menciptakan bentuk baru konektivitas sosial-

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

politik yang memungkinkan interaksi antara negara dan warga berlangsung lebih cepat, cair, dan fleksibel. Dalam konteks Samarinda, ruang virtual melalui SAMAGOV menjadi arena baru komunikasi pemerintahan sekaligus ruang partisipasi warga negara.

Kehadiran SAMAGOV juga dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam pemberitaan mengenai pengembangan smart city Samarinda, Wali Kota Samarinda menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun roadmap SPBE dan mengembangkan super-app SAMAGOV untuk mengintegrasikan seluruh layanan digital perangkat daerah dalam satu sistem pelayanan terpadu. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak lagi dipahami sebatas inovasi teknologi administratif, tetapi sebagai strategi pembangunan tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan konektivitas digital.

Dari perspektif digital citizenship, keberadaan SAMAGOV turut memperluas ruang partisipasi warga negara. (Isin, 2015) menjelaskan bahwa kewargaan digital muncul ketika warga menggunakan platform digital untuk berinteraksi dengan negara, mengakses layanan publik, serta membangun keterlibatan politik dan sosial dalam ruang virtual. Dengan demikian, aplikasi pemerintahan seperti SAMAGOV tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga sebagai medium pembentukan ruang publik digital (*digital public sphere*) di tingkat lokal.

Namun demikian, perkembangan digital governance juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transformasi pemerintahan digital sering kali masih menghadapi persoalan kesenjangan literasi digital, ketimpangan akses teknologi, hingga dominasi komunikasi satu arah pemerintah terhadap masyarakat (Burhan et al., 2024; Couldry & Mejias, 2019; Margetts et al., 2017). Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat sejauh mana SAMAGOV benar-benar mampu menciptakan pola partisipasi warga negara yang substantif, atau justru hanya menjadi instrumen modernisasi administratif semata.

Secara akademis, penelusuran terhadap literatur terdahulu mengenai pola penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi warga di ruang virtual menunjukkan dualisme fokus kajian. Di satu sisi, kelompok studi *e-government* konvensional cenderung menempatkan ruang virtual sebatas instrumen teknokratis untuk efisiensi administrasi publik, di mana interaksi negara dan warga masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah (*top-down*) yang kaku (Kurniasih & Nugroho, 2022). Di sisi lain, kajian sosiologi politik digital lebih banyak menyoroti partisipasi publik yang tumbuh secara otonom di luar saluran resmi pemerintah, seperti aktivisme siber dan gerakan viral di media sosial yang bersifat spontan namun sering kali terpisah dari pembuat kebijakan (Wijayanto et al., 2021). Kendati demikian, masih terdapat celah literatur (*literature gap*) mengenai bagaimana platform digital resmi milik pemerintah daerah (seperti *super-app*) dapat menjembatani kedua dinamika tersebut: memadukan struktur formal birokrasi dengan responsivitas kewargaan digital (*digital citizenship*) yang cair, khususnya dalam konteks sosiogeografis wilayah urban penyangga kawasan strategis nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pola penyelenggaraan pemerintahan digital melalui SAMAGOV berlangsung di Kota Samarinda, bagaimana warga negara berpartisipasi dalam ruang virtual yang dibentuk oleh aplikasi tersebut, serta bagaimana relasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berkembang dalam konteks digital governance di daerah urban penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang melampaui analisis institusional konvensional. Selama ini, kajian mengenai partisipasi warga cenderung berfokus pada penguatan kapasitas birokrasi semata tanpa melihat dinamika di ruang siber. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan kerangka kerja revolusi digital untuk melihat intensitas hubungan antara warga dan negara. Hal ini diharapkan dapat memberikan abstraksi mendalam mengenai pola komunikasi publik di era pasca-digital.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat posisi strategis Samarinda dalam menyongsong

perpindahan ibu kota negara. Dengan memahami bagaimana pola penyelenggaraan pemerintahan di ruang virtual berlangsung, pemerintah daerah dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih responsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengabstraksikan peran kewargaan digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat perkotaan serta memetakan dinamika transisi revolusi digital di Kota Samarinda.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi warga negara di ruang virtual dalam konteks digital governance di Kota Samarinda. (Creswell & Poth, 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari persoalan sosial maupun kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan pola interaksi, pengalaman, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan secara sistematis pola hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan warga negara melalui platform digital, khususnya melalui aplikasi SAMAGOV sebagai super-app pelayanan publik Pemerintah Kota Samarinda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika interaksi sosial-politik yang berlangsung dalam ruang virtual, termasuk pola partisipasi digital masyarakat dan transformasi model komunikasi pemerintahan di era digital. Secara substantif, penelitian ini berangkat dari perspektif digital governance dan digital citizenship yang melihat bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik virtual baru yang mempertemukan negara dan warga negara dalam hubungan yang lebih terbuka, fleksibel, dan partisipatif (Burhan et al., 2024; Isin, 2015; Janowski, 2015). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi sebagai persoalan teknologi administratif, tetapi juga sebagai transformasi relasi sosial-politik antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami percepatan transformasi digital dan urbanisasi. Kedua, Pemerintah Kota Samarinda telah mengembangkan aplikasi SAMAGOV sebagai platform digital terintegrasi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik. Ketiga, karakteristik masyarakat urban Samarinda yang memiliki tingkat penggunaan media digital cukup tinggi menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji praktik partisipasi warga negara di ruang virtual. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, interpretasi data, dan analisis terhadap fenomena sosial yang diteliti (Moleong, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, catatan observasi, dokumentasi digital, dan perangkat perekam data. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan perspektif teori revolusi digital dan digital citizenship dari (Tapsell & Jurriëns, 2017) untuk menjelaskan bagaimana ruang virtual membentuk pola hubungan baru antara pemerintah dan warga negara dalam konteks digital governance di Kota Samarinda.

## PEMBAHASAN

### Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Samarinda di Ruang Virtual

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi pada platform digital dan wawancara dengan informan di tingkat kelurahan serta Warga pengguna aplikasi SAMAGOV di Samarinda, ditemukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bertransformasi ke arah penggunaan instrumen virtual secara masif. Data menunjukkan bahwa 90% koordinasi kewilayahan di tingkat bawah kini dilakukan melalui grup pesan instan (WhatsApp) dan akun media sosial resmi (Badan Pusat Statistik Samarinda, 2024). Pola ini memangkas durasi distribusi informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu 2-3 hari melalui surat fisik menjadi hitungan menit.

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

353

Indexed

SINTA 4



Data observasi juga mencatat adanya mekanisme pelaporan partisipatif berbasis visual. Warga melakukan dokumentasi foto terhadap kerusakan infrastruktur atau gangguan layanan publik, yang kemudian diunggah ke ruang virtual untuk mendapatkan respons cepat dari pihak kelurahan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa penggunaan kanal virtual ini cenderung didominasi oleh pengumuman administratif satu arah, di mana tingkat interaksi dialogis (tanya-jawab) hanya terjadi pada 30% dari total aktivitas di ruang virtual tersebut. Di sisi lain, terdapat kesenjangan responsivitas antar wilayah yang berkorelasi dengan tingkat literasi digital aparat pengelola.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam ontologi birokrasi di Kota Samarinda, dari model birokratis konvensional menuju apa yang disebut sebagai *responsive-digital governance*. Manifestasi penyelenggaraan pemerintahan di ruang virtual di Samarinda bukan sekadar pemindahan medium komunikasi, melainkan rekonstruksi pola kepemimpinan yang lebih cair (Kencana & Meisyanti, 2020). Pola ini mengonfirmasi teori revolusi digital Ross Tapsell, di mana konektivitas meruntuhkan sekat-sekat hierarki tradisional dan memperpendek jarak kekuasaan (Tapsell, 2015). Penggunaan instrumen virtual oleh aparat tingkat Kelurahan merupakan bentuk adaptasi institusional terhadap dinamika masyarakat urban yang menuntut kecepatan.

Secara interpretatif, penggunaan ruang virtual untuk fungsi pengawasan dan layanan publik secara *real-time* menandakan lahirnya "birokrasi tanpa dinding." Namun, hasil penelitian yang menunjukkan dominasi komunikasi satu arah (*top-down*) mengindikasikan bahwa tata kelola digital di Samarinda masih berada pada tahap fungsional awal. Hal ini sejalan dengan argumen (A. B. Pratama, 2022) bahwa implementasi teknologi dalam pemerintahan seringkali tidak langsung diikuti oleh budaya demokrasi digital yang deliberative. Penyelenggara pemerintahan di Samarinda lebih memposisikan ruang virtual sebagai "papan pengumuman digital" daripada sebagai arena musyawarah virtual yang inklusif.

Jika dibandingkan dengan kajian (A F Saputra, 2021), fenomena di Samarinda menunjukkan kemiripan dalam hal pemanfaatan aktivisme visual sebagai instrumen kontrol sosial. Warga memaksakan akuntabilitas birokrasi melalui bukti-bukti digital yang diunggah di ruang publik virtual. Perbandingan ini menegaskan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan di ruang virtual di Samarinda sangat dipengaruhi oleh tekanan dari bawah (*bottom-up pressure*). Birokrasi dipaksa untuk responsif bukan karena dorongan sistemik internal, melainkan karena adanya transparansi digital yang memungkinkan kinerja mereka diawasi secara terbuka oleh warga negara digital.

Lebih jauh lagi, kendala literasi digital yang ditemukan di lapangan mencerminkan adanya *digital divide* di tingkat aparat birokrasi. Hal ini menghambat terciptanya standarisasi protokol komunikasi yang profesional di ruang virtual. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suwana, 2020), efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola interaksi di ruang siber. Oleh karena itu, pola yang terbentuk di Samarinda saat ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individu aparat, bukan merupakan prosedur operasional standar yang terintegrasi secara sistemik.

Secara keseluruhan, pola penyelenggaraan pemerintahan di ruang virtual di Samarinda merupakan hasil dari konvergensi antara kebutuhan efisiensi birokrasi dan tuntutan ekspektasi warga di kota satelit IKN. Pola ini terus bertransformasi menuju bentuk yang lebih stabil, namun memerlukan intervensi kebijakan dalam hal standarisasi protokol komunikasi dan peningkatan kapasitas digital aparat. Keberhasilan pola ini di masa depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ruang virtual dapat diubah dari sekadar kanal informasi menjadi kanal partisipasi yang bermakna bagi warga negara (Wijayanto et al., 2021).

## Dinamika Partisipasi Warga Negara Samarinda dalam Ruang Virtual

Data penelitian yang dihimpun melalui observasi aktivitas digital dan wawancara dengan subjek penelitian di Kota Samarinda menunjukkan adanya transformasi pola partisipasi dari model formal-prosedural menuju partisipasi virtual yang bersifat organik. Temuan lapangan mengidentifikasi bahwa mayoritas partisipan aktif di ruang virtual berasal dari segmen masyarakat kelas menengah perkotaan yang

memiliki aksesibilitas tinggi terhadap perangkat digital. Partisipasi ini tidak lagi bergantung pada jadwal rapat resmi pemerintah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), melainkan muncul secara spontan melalui kanal media sosial dan aplikasi percakapan grup ((Badan Pusat Statistik Samarinda, 2024).

Bentuk partisipasi yang paling dominan ditemukan adalah penyampaian keluhan terkait infrastruktur publik, pemberian saran kebijakan secara langsung melalui kolom komentar akun resmi pemerintah, serta pengawasan kolektif terhadap jalannya proyek pembangunan di tingkat lokal. Data menunjukkan bahwa warga cenderung memilih kanal virtual karena adanya persepsi mengenai reduksi jarak sosial dengan pejabat publik. Selain itu, ditemukan fenomena "aktivisme viral" sebagai strategi warga untuk menekan responsivitas pemerintah. Namun, hasil observasi juga menunjukkan adanya sisi lain berupa polarisasi opini dan perdebatan emosional di ruang virtual yang seringkali tidak berujung pada resolusi kebijakan, melainkan konflik antarwarga (Wijayanto et al., 2021).

Temuan mengenai pergeseran pola partisipasi warga di Samarinda memberikan gambaran nyata mengenai penguatan kewargaan digital (*digital citizenship*) di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara interpretatif, partisipasi yang bersifat *ad hoc* dan spontan ini menandakan bahwa warga negara tidak lagi memposisikan diri sebagai objek pasif dari kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki agensi untuk melakukan intervensi politik harian. Hal ini mengonfirmasi tesis Tapsell (2015) yang menyatakan bahwa konektivitas digital memiliki peran krusial dalam merombak relasi kuasa tradisional. Ruang virtual di Samarinda telah menjadi arena di mana hierarki birokrasi didekonstruksi melalui interaksi digital yang lebih setara (Tapsell, 2015).

Fenomena aktivisme viral yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan argumen (A F Saputra, 2021) mengenai fungsi media digital sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Ketika jalur birokrasi konvensional mengalami kemandekan, warga menggunakan kekuatan resonansi digital untuk memaksa otoritas agar lebih responsif. Namun, jika dibandingkan dengan kajian (Wijayanto et al., 2021), dinamika di Samarinda juga menunjukkan kerentanan terhadap polarisasi informasi. Partisipasi yang tinggi tanpa dibarengi dengan etika kewargaan digital yang matang berisiko mengubah ruang publik virtual menjadi ruang kontestasi identitas yang kontraproduktif. Oleh karena itu, efektivitas partisipasi di Samarinda sangat bergantung pada keseimbangan antara keberanian berekspresi dan literasi politik digital masyarakatnya.

Secara teoretis, dinamika partisipasi di Samarinda membuktikan bahwa ruang virtual bukan sekadar pelengkap (*add-on*) bagi demokrasi lokal, melainkan telah menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Keberdayaan warga yang muncul dari perasaan memiliki akses langsung terhadap pemegang otoritas merupakan modal sosial penting bagi tata kelola kota satelit IKN di masa depan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi digital di Samarinda tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi oleh pemerintah (*supply side*), tetapi juga oleh kualitas dan intensitas partisipasi yang dilakukan oleh warga negaranya (*demand side*). Dengan demikian, pola partisipasi virtual di Samarinda merupakan manifestasi dari transformasi sosiopolitik yang menuntut birokrasi untuk bekerja dalam ekosistem yang lebih inklusif dan transparan (Suwana, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa revolusi digital di Kota Samarinda telah mentransformasi pola penyelenggaraan pemerintahan dari model birokrasi kaku menuju tata kelola digital yang responsif (*responsive-digital governance*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang virtual bukan lagi sekadar instrumen pendukung, melainkan telah menjadi arena utama dalam mendistribusikan kebijakan dan mengakomodasi aspirasi publik secara *real-time*. Penyelenggara pemerintahan di tingkat akar rumput (RT/RW dan Kelurahan) telah mengadopsi platform virtual untuk memangkas jarak administratif, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kapasitas literasi digital individu aparat. Secara paralel, dinamika partisipasi warga negara di Samarinda menunjukkan penguatan konsep kewargaan digital (*digital citizenship*). Terjadi pergeseran dominasi dari partisipasi

fisik-prosedural menuju partisipasi virtual yang bersifat spontan, organik, dan memiliki daya tekan politik melalui aktivisme viral. Esensi dari temuan ini adalah lahirnya hubungan negara-warga yang lebih cair di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana aksesibilitas digital mereduksi sekat sosial dan hierarki kekuasaan tradisional. Namun, transisi ini masih menyisakan tantangan berupa polarisasi informasi dan pola komunikasi yang cenderung masih bersifat satu arah (*top-down*).

Sebagai praktis, Pemerintah Kota Samarinda perlu segera menyusun SOP dan regulasi teknis pengelolaan kanal komunikasi virtual agar aspirasi publik dapat ditindaklanjuti secara terukur dan transparan. Sementara secara akademis, diperlukan rekonstruksi teori kewargaan digital berbasis kearifan lokal serta penelitian lanjutan berbasis kuantitatif atau *mixed-methods* untuk mengukur dampak interaksi virtual terhadap *public trust* dan efektivitas pelayanan publik secara empiris.

## REFERENSI

- A. B. Pratama. (2022). Smart is not Equal to Technology: The Development of Smart Cities in Indonesia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 15(1), 125–132.
- A F Saputra. (2021). One Nation Under Virtual Police: Kontrol Sosial dan Aktivisme Viral. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 414–439.
- Badan Pusat Statistik Samarinda. (2024). *Samarinda dalam angka 2024*. Kantor Statistik Kotamadya Samarinda.
- Burhan, R., Sitti Rabiatul Wahdaniyah, & Ade Irma Surani Haliq. (2024). Digital Era Governance Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pandemi. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 94–105. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v5i1.7828>
- Couldry, Nick., & Mejias, U. Ali. (2019). *The costs of connection : how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2018). *Qualitative inquiry and research design* (4th ed.). SAGE.
- Isin, E. F. . (2015). *Being digital citizens*. Rowman & Littlefield.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Kencana, W. H., & Meisyanti, M. (2020). The Implementation of Mass Media Digital Platform in Indonesia. *Komunikator*, 12(2). <https://doi.org/10.18196/jkm.122038>
- Kurniasih, Y., & Nugroho, J. T. (2022). INOVASI PEMERINTAH DAERAH: SIMPERDA SEBAGAI WUJUD SMART CITY DI KOTA SEMARANG. *GEMA PUBLICA*, 7(1), 187–196. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.187-196>
- Margetts, Helen., John, Peter., Hale, S. A. ., & Yasseri, Taha. (2017). *Political turbulence : how social media shape collective action*. Princeton University Press.
- Moleong, L. J. . (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nuswantoro, R., Birowo, M. A., Saraswatiand, I., & Fachrudin, F. (2017). Digital Democracy in Rural Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 33, 00072. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173300072>
- Suwana, F. (2020). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>
- Tapsell, R. (2015). Platform convergence in Indonesia. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 21(2), 182–197. <https://doi.org/10.1177/1354856514531527>
- Tapsell, Ross., & Jurriëns, Edwin. (2017). *Digital Indonesia : Connectivity and Divergence*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Udhany, D., & Irwansyah, I. (2021). PENGARUH INTERNET TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA: INTERPRETASI KONSEP GERAKAN SOSIAL DARI MANUEL CASTELLS. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(10), 181. <https://doi.org/10.47313/ppl.v5i10.949>

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 9 September 2026

Wijayanto, W., Sardini, N. H., & N. Elsitra, G. (2021). Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif bagi Pegiat Anti-Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 179–196.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>